

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Sahya. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Chahyaningsih Meylani dan Angger Sigit. (2018). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- MacAndrews Colin dan Mochtar Mas'oed. (2011). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mufti, Muslim. (2013). *Kekuatan Politik Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Noer, Hamka Hendra. (2014). *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Poernomo, Bambang. (1993). *Pola Dasar Teori Dasar Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Teguh. (2018). *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media.
- Setiyono, Budi. (2016). *Birokrasi Dalam Perspektif Politik Dan Administrasi*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal

- Antari, Putu Eva Ditayani. (Juni 2018). Interpretasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia, *Jurnal Panorama Hukum, Volume 3, Nomor 1*.
- Budiono. (Desember 2019). Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten Tulungagung). *Mizan Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 2*.
- Dedi, Agus. (Agustus 2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Moderat, Volume 5, Nomor 3*.
- Firnas, M Ardian. (Juni 2016). Politik Dan Birokrasi Di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Review Politik, Volume 6, Nomor 1*.

Herman, Aswin Eka Adhi. (Juni 2009). Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori Dan Politik Di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS, Volume 3, Nomor 1*.

Martini, Rina. (Februari 2015). Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial, Volume 14, Nomor 1*.

Negara, Komisi Aparatur Sipil. (Desember 2018). Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Policy Brief, Volume 1, Nomor 1*.

Priyono, Endang Larasati dan Sri Suwitri. (2007). Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 1*.

Solihah, Ratnia. (2018). Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1*.

Zuhro, Siti. (2010). Good Governance Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik, Volume 7 Nomor 1*.

C. Karya Ilmiah

Sudirman. (2019). *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Serentak Di Kota Bima Tahun 2018 (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang ASN. UU Nomor 5 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara: 5494.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. UU Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

F. Web

Reyn Gloria, *Bawaslu Tangani Ribuan Pelanggaran Netralitas ASN Saat Pemilu 2019*, diakses dari laman Bawaslu.go.id, pada tanggal 25 Juli 2020.

Sejarah, diakses dari laman muarojambikab.go.id, pada tanggal 01 Mei 2020.

Herdiansyah Hamzah, *Netralitas ASN Dalam Pilkada*, diakses dari laman herdi.web.id, pada tanggal 19 Mei 2021.